

EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI SEWA TOKO UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Ahmad Pajar¹, Ramona Handayani², Agus Surya Dharma³

Program Studi Adminstrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: pajarahmad51@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah masih ada pedagang yang terlambat melakukan pembayaran, Kurangnya sosialisasi dari pelaksana kepada para pedagang dan Turunnya pendapatan dalam Retribusi Sewa Toko Pasar Paringin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama, tahapan kurang efektif yang mana penagihannya dilakukan masih menggunakan sistem pemungutan. Kedua, pencapaian sasaran belum efektif dikarenakan adanya persaingan market place dan toko. Ketiga, pencapaian target belum efektif dikarenakan target sewa toko belum memenuhi. Keempat, sosialisasi kurang efektif dimana kurangnya sosialisasi. Kelima, koordinasi sudah efektif yang mana petugas menerima pembayaran retribusi dari wajib retribusi. Keenam, kerjasama sudah efektif dimana antara penerima retribusi dan pedagang menciptakan sistem retribusi yang efektif. Ketujuh, penyesuaian diri kurang efektif yang mana wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu. Kedelapan, pengadaan blangko sudah efektif yang mana blangko retribusi dibuat secara berkala. Kesembilan, kemampuan kurang efektif yang mana bidang retribusi yang hanya berjumlah 1 orang. Faktor penghambat adalah penagihan retribusi menggunakan sistem pemungutan, adanya persaingan market place, penurunan pendapatan pedagang, minimnya kesadaran para retribusi dalam pembayaran dan wajib retribusi tidak tepat dalam pembayaran. sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan sop dan petugas memastikan pedagang yang aktif pada pasar. Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sebaiknya melakukan penambahan petugas untuk melakukan perencanaan di tahapan dalam pemungutan retribusi sehingga dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya berjalan dengan efektif

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Pasar Paringin, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

The existing problems are that there are still traders who are late in making payments, the lack of socialization from the implementer to the traders and the decline in income from the Paringin Market Shop Rental Retribution. The research method used is descriptive and qualitative with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. The results of this study. First, the stages are ineffective where the billing is still carried out using a collection system. Second, the achievement of targets has not been effective due to competition between marketplaces and shops. Third, the achievement of targets has not been effective because the shop rental target has not been met. Fourth, socialization is ineffective due to the lack of socialization. Fifth, coordination is effective where officers receive retribution payments from retribution payers. Sixth, cooperation is effective where retribution recipients and traders create an effective retribution system. Seventh, self-adjustment is ineffective where certain retribution payers do not pay on time. Eighth, the procurement of retribution forms is effective where retribution forms are made periodically. Ninth, the ability is ineffective where the retribution field only has one person. Inhibiting factors include the collection of fees using a collection system, competition in marketplaces, declining vendor income, minimal awareness among vendors regarding payment, and inaccurate payment of fees. Supporting factors include adherence to standard operating procedures (SOPs) and officers ensuring that vendors are active in the market. The Head of the Balangan Regency Industry and Trade Office should add additional personnel to plan the stages of fee collection so that market fee collection can be carried out effectively and increase regional revenue.

Keywords: Effectiveness, Paringin Market Fee, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif sendiri yang berasal dari aspirasi masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki hak penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya.

Otonomi yang diberikan melalui regulasi tersebut sepatutnya dimanfaatkan secara optimal agar potensi daerah tidak terabaikan. Pengelolaan yang baik atas potensi daerah diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan pembangunan juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerahnya. Potensi tersebut nantinya dapat menjadi sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi, atau pungutan lainnya yang masuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Komponen PAD meliputi:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Pendapatan sah lainnya.

Efektivitas menggambarkan keseluruhan tahapan mulai dari input, proses, hingga output yang berorientasi pada pencapaian tujuan suatu kebijakan, program, atau organisasi, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Efektivitas juga menjadi indikator keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai target dan sasarannya. Dalam konteks pemerintahan, efektivitas erat kaitannya dengan kepentingan publik karena mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kebijakan otonomi daerah memberi ruang yang luas bagi pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Setiap program pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai prioritasnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, proses realisasi otonomi daerah kerap menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial.

Salah satu sumber PAD yang penting adalah Retribusi Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tercipta kondisi pasar yang tertib, aman, bersih, dan nyaman. Peraturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, serta lokasi pembayaran retribusi. Aturan ini dibuat untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Namun dalam praktiknya, kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Balangan, khususnya di Pasar Paringin, belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi awal penulis, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Keterlambatan Pembayaran

Masih banyak pedagang yang belum melakukan pembayaran retribusi secara tepat waktu. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan blangko retribusi, yang membuat pembayaran harus ditunda ke bulan berikutnya. Hal ini terlihat pada data berikut:

Tabel 1.1
Data Keterlamabatan Pedagang

No	Bulan	Jumlah Pedagang	Jumlah Keterlambatan	Ket
1	Januari	168	43	
2	Februari	168	51	
3	Maret	168	40	
4	April	168	35	
5	Mei	168	70	
6	Juni	168	68	
7	Juli	168	77	
8	Agustus	168	39	
9	September	168	84	
10	Oktober	168	89	
11	November	168	80	
12	Desember	168	92	

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Balangan

2. Kurangnya Sosialisasi dan Kesadaran Pedagang

Sosialisasi kebijakan retribusi masih sangat terbatas. Banyak pedagang yang belum memahami ketentuan yang berlaku, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Minimnya pendapatan pedagang juga turut menjadi alasan mengapa kewajiban retribusi tidak dipenuhi secara tepat waktu. Padahal, jika dikelola secara optimal, potensi pasar dapat menjadi sumber PAD yang besar. Dalam Peraturan Daerah juga disebutkan bahwa keterlambatan pembayaran lebih dari 3 bulan seharusnya dikenakan denda sebesar 2%, namun implementasinya masih belum berjalan efektif.

3. Penurunan Realisasi Retribusi Sewa Toko

Pendapatan dari retribusi sewa toko di Pasar Paringin terus mengalami penurunan sejak tahun 2022 hingga 2024. Para pedagang menolak membayar retribusi karena menganggap pendapatan mereka menurun. Pasar ini memiliki 168 toko dengan delapan blok. Besaran retribusi di lantai satu sebesar Rp60.000 dan di lantai dua Rp50.000. Berikut adalah data realisasi retribusi:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Sewa Toko Pasa Paringin
Kabupaten Balangan Tahun 2022-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
3	2022	200.080.000	180.272.000	90%
4	2023	200.080.000	159.998.400	73%
5	2024	200.080.000	143.971.200	64%

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Balangan, 2024

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa optimalisasi potensi pasar sebagai sumber PAD belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Toko Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Paringin Kabupaten Balangan”.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Paringin Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2016:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2016:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	2	3
Richard M. Steers (2017:53) ukuran efektivitas	1. Pencapaian Tujuan	a. Tahapan Penagihan Retribusi b. Pencapaian Sasaran c. Target Retribusi
	1. Integrasi	a. Sosialisasi b. Koordinasi c. Kerjasama

	2. Adaptasi	a. Penyesuaian diri para retribusi b. Pengadaan Blanko c. Kemampuan SDM Pemungut Retribusi
--	-------------	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Toko Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Toko Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14).

2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.

3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Toko Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Paringin Kabupaten Balangan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Di antara komponen PAD, retribusi daerah memegang peranan penting, termasuk retribusi yang berasal dari penyewaan toko-toko milik pemerintah. Retribusi sewa toko memiliki potensi signifikan sebagai sumber pendapatan daerah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi di Pasar Paringin, Kabupaten Balangan, dapat digunakan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dipahami sebagai sebuah proses yang berlangsung secara bertahap. Untuk menjamin tercapainya tujuan akhir secara optimal, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur, baik berupa tahapan pencapaian pada setiap bagian tujuan maupun dalam bentuk periodisasi waktu yang sistematis. Dengan pendekatan ini, proses menuju tujuan menjadi lebih terarah dan terukur.

a. Tahapan Penagihan Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur penagihan retribusi di Pasar Paringin belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari metode penagihan yang masih menggunakan pendekatan berdasarkan lokasi atau blok, yang dinilai kurang efisien bila dibandingkan dengan sistem kubikasi yang telah diterapkan di beberapa daerah lain dan terbukti lebih efektif.

Selanjutnya, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa proses penagihan retribusi masih bersifat manual, di mana petugas melakukan penagihan langsung ke lapangan tanpa dukungan sistem pencatatan digital yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data retribusi masih rendah.

Temuan ini juga diperkuat melalui dokumentasi, yang menunjukkan bahwa tahapan penagihan retribusi di Pasar Paringin masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3, yang memberikan gambaran lebih lanjut mengenai ketidakefisienan dalam proses penagihan yang berlangsung:

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses penagihan retribusi di Pasar Paringin masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh metode pemungutan yang masih dilakukan berdasarkan lokasi atau blok, yang dinilai

kurang efisien dibandingkan dengan sistem kubikasi yang telah diterapkan di daerah lain dan terbukti lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.

b. Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi di Pasar Paringin belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan dengan platform marketplace dan toko-toko modern, serta banyaknya kios yang tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap tidak tercapainya target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi sewa toko mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya periode 2022 hingga 2024. Penurunan ini disebabkan oleh engganannya para pedagang untuk membayar retribusi, dengan alasan bahwa omzet atau pendapatan mereka menurun secara signifikan.

Temuan ini turut didukung oleh dokumentasi yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian target retribusi di Pasar Paringin masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dalam Tabel 4.4, yang menyajikan data lebih lanjut terkait ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan retribusi.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran belum efektif dikarenakan adanya persaingan market place dan toko serta banyaknya toko yang tutup, sehingga dalam pencapaian dalam penerimaan retribusi pada pasar paringin tidak sesuai dengan target yang dicapai.

c. Target

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi sewa toko di Pasar Paringin masih belum efektif. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain adalah penurunan pendapatan pedagang serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi. Hasil observasi peneliti mendukung temuan tersebut, di mana menurunnya kondisi ekonomi masyarakat berdampak langsung pada daya beli dan kemampuan bayar para pedagang. Akibatnya, banyak toko yang tidak beroperasi atau dibiarkan kosong, sehingga berkurangnya aktivitas perdagangan turut menghambat pencapaian target penerimaan retribusi.

Selain itu, dokumentasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pencapaian target retribusi sewa toko masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan dalam Tabel 4.5.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian target belum efektif dikarenakan target sewa toko pada Pasar Paringin belum memenuhi pada tiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan pedagang dan kurangnya pengawasan terhadap retribusi sewa toko pada pasar paringin

2. Integrasi

Integrasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, membangun konsensus, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak atau lembaga lainnya. Konsep ini juga mencakup proses internalisasi nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan program. Dalam konteks ini, integrasi menjadi bagian penting dalam implementasi program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan retribusi daerah kepada para pedagang masih kurang efektif. Kurangnya penyuluhan dari pelaksana kepada wajib retribusi, ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan pedagang, menyebabkan kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran retribusi menjadi rendah.

Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa sosialisasi yang kurang efektif berdampak pada pelaksanaan pemungutan dan pengawasan retribusi pasar. Banyak pedagang yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah, yang mengharuskan pemberian denda sebesar 2% apabila keterlambatan pembayaran melewati 3

bulan. Namun, kenyataannya masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran melebihi batas waktu tersebut tanpa dikenakan sanksi.

Dengan demikian, dari gabungan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan retribusi serta kondisi ekonomi pedagang yang minim berkontribusi pada rendahnya kepatuhan dalam pembayaran retribusi pasar.

b. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam proses penagihan retribusi di Pasar Paringin sudah berjalan dengan efektif. Petugas penagihan secara rutin menerima pembayaran dari wajib retribusi dan memberikan bukti pembayaran sebagai tanda transaksi. Selanjutnya, hasil penagihan disetorkan ke kas daerah melalui bendahara atau petugas administrasi yang ditunjuk.

Dokumentasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas petugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi, pencatatan dan pelaporan, penanganan penolakan atau pelanggaran, serta etika pelayanan terhadap pedagang. Dengan demikian, koordinasi antar pelaksana dalam sistem penagihan telah terlaksana secara baik dan terorganisir.

c. Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam pengelolaan retribusi toko di Pasar Paringin sudah berjalan dengan efektif. Hubungan yang terjalin antara petugas penerima retribusi dan pedagang menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya efisien dan adil, tetapi juga berkelanjutan. Kerjasama ini meliputi aspek kepercayaan, transparansi, serta pelayanan yang saling menguntungkan.

Petugas secara aktif memantau pedagang yang beroperasi di pasar dan segera melaporkan kendala di lapangan, seperti tunggakan pembayaran atau penolakan retribusi. Pendekatan terpadu ini memungkinkan penanganan masalah secara cepat dan tepat, sehingga memperkuat efektivitas kerjasama antara kedua belah pihak.

3. Adaptasi

Adaptasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Salah satu indikatornya adalah proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja yang efektif. Konsep ini juga berlaku dalam pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

a. Penyesuaian Diri Dari Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam melakukan penyesuaian terhadap pembayaran retribusi masih kurang efektif. Beberapa wajib retribusi tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau bahkan membayar kurang dari ketentuan. Sesuai aturan, mereka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan atas tunggakan retribusi yang belum atau kurang dibayar, dengan penagihan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Observasi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penagihan, di mana sebagian pedagang enggan membayar retribusi karena mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penyesuaian diri dalam sistem pemungutan retribusi pasar.

b. Pengadaan Blangko

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengadaan blangko retribusi sudah berjalan secara efektif. Blangko tersebut dibuat secara rutin untuk menjamin ketersediaan bukti pembayaran resmi dalam proses pemungutan retribusi, sehingga mendukung kelancaran dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Selain itu, pengadaan blangko dibiayai melalui anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, yang selalu disesuaikan dengan alokasi dana tahunan, sehingga memastikan ketersediaannya setiap tahun.

c. Kemampuan SDM Para Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam pemungutan retribusi di Pasar Paringin masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah petugas, di mana hanya satu orang yang bertanggung jawab atas berbagai tugas mulai dari perencanaan, penagihan, hingga pencatatan objek dan subjek retribusi.

Observasi juga menunjukkan bahwa jumlah petugas penagihan biasanya hanya dua orang, sehingga proses penagihan memerlukan waktu yang cukup lama mengingat banyaknya wajib retribusi di Pasar Paringin.

Dokumentasi yang ada juga mengindikasikan bahwa tahapan penagihan retribusi masih belum berjalan secara optimal, sebagaimana tercermin dalam tabel 4.5.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan kurang efektif yang mana dalam pemungutan retribusi di Pasar Paringin hal ini tidak sesuai dengan banyaknya tugas yang diembannya, bidang retribusi yang hanya berjumlah 2 orang yang bertugas mempunyai kewajiban dalam penyusunan rencana terhadap retribusi, pelaksanaan penagihan atas tagihan, mencatat objek dan subjek retribusi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Retribusi Sewa Toko Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Paringin Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat

a. Penagihan Retribusi Menggunakan Sistem Pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa proses penagihan retribusi di Pasar Paringin belum berjalan efektif. Metode pemungutan yang digunakan masih berdasarkan lokasi atau blok, yang dianggap kurang efisien jika dibandingkan dengan sistem kubikasi yang diterapkan di wilayah lain.

Selain itu, penagihan masih dilakukan secara manual oleh petugas lapangan tanpa dukungan sistem pencatatan elektronik yang akurat.

Dokumentasi juga menunjukkan bahwa tahapan penagihan retribusi ini masih belum optimal, sebagaimana terlihat pada tabel 4.7.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penagihan retribusi belum efektif dimana dalam penagihan retribusi pemungutan tidak begitu efisien, dimana dalam penagihannya dilakukan masih menggunakan sistem pemungutan per lokasi atau blok, yang dianggap kurang efektif dibandingkan dengan sistem kubikasi yang diterapkan di daerah lain

b. Adanya Persaingan Market Place

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa persaingan dari marketplace dan banyaknya toko yang tutup menyebabkan penerimaan retribusi di Pasar Paringin tidak mencapai target yang diharapkan.

Observasi juga menunjukkan penurunan pendapatan dari Retribusi Sewa Toko di Pasar Paringin pada periode 2022 hingga 2024, karena beberapa pedagang enggan membayar retribusi dengan alasan penurunan penghasilan.

Dokumentasi yang ada menguatkan bahwa pencapaian sasaran retribusi di Pasar Paringin masih belum efektif, seperti yang terlihat pada tabel 4.8.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa adanya persaingan market place dan toko serta banyaknya toko yang tutup, sehingga dalam pencapaian dalam penerimaan retribusi pada pasar paringin tidak sesuai dengan target yang dicapai.

c. Penurunan Pendapatan Pedagang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penurunan pendapatan pedagang serta lemahnya pengawasan terhadap retribusi sewa toko di Pasar Paringin menjadi faktor utama masalah. Observasi juga memperlihatkan bahwa target penerimaan retribusi belum tercapai karena kondisi ekonomi masyarakat yang melemah, sehingga kemampuan pedagang untuk membayar berkurang dan banyak toko yang tutup atau kosong akibat berkurangnya aktivitas perdagangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan pedagang dan kurangnya pengawasan menjadi kendala dalam pengelolaan retribusi sewa toko di Pasar Paringin.

d. Minimnya Kesadaran Para Retribusi dalam Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi pasar masih rendah, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelunasan pembayaran.

Observasi juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal, yang berdampak pada pelaksanaan pemungutan dan pengawasan retribusi pasar kurang efektif. Banyak pedagang yang tidak membayar sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Peraturan Daerah, dimana seharusnya keterlambatan pembayaran selama tiga bulan dikenakan denda 2%, namun kenyataannya masih banyak pedagang yang belum membayar melewati batas waktu tersebut.

Dari kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran wajib retribusi menjadi penyebab utama seringnya pembayaran retribusi pasar terabaikan.

e. Wajib Retribusi Tidak Tepat dalam Pembayaran

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Dari hasil observasi peneliti terlihat yang mana kurang bisa menyesuaikan dalam penagihan retribusi yang mana Masih ada pedagang yang tidak mau membayar dalam penagihan retribusi terdapat beberapa pedagang yang tidak mau bayar retribusi karena mereka merasa keberatan sebab penghasilan mereka menurun drastis.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

2. Faktor Pendukung

a. Sesuai dengan SOP

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petugas penagihan akan menerima pembayaran retribusi dari wajib retribusi dan memberikan tanda bukti pembayaran dan Setelah menerima pembayaran, petugas akan menyetor hasil penagihan ke kas daerah melalui bendahara atau petugas administrasi yang ditunjuk.

Dari hasil observasi peneliti terlihat petugas penagihan akan menerima pembayaran retribusi dari wajib retribusi dan memberikan tanda bukti pembayaran dan Setelah menerima pembayaran, petugas akan menyetor hasil penagihan ke kas daerah melalui bendahara atau petugas administrasi yang ditunjuk.

Dari hasil dokumentasi terlihat dalam petugas melakukan sesuai dengan SOP dimana pelaksanaan tugas juga mengikuti SOP pemungutan retribusi pasar, yang mencakup mekanisme pemungutan (harian/bulanan), cara pencatatan dan pelaporan, penanganan terhadap penolakan atau pelanggaran dan etika pelayanan terhadap pedagang. (*Sumber : SOP Penagihan Retribusi Pasar*)

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa petugas penagihan akan menerima pembayaran retribusi dari wajib retribusi dan memberikan tanda bukti pembayaran dan Setelah menerima pembayaran, petugas akan menyetor hasil penagihan ke kas daerah melalui bendahara atau petugas administrasi yang ditunjuk

b. Petugas Memastikan Pedagang Yang Aktif Pada Pasar

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama dalam retribusi toko pasar paringin sudah efektif dimana kerja sama antara penerima retribusi dan pedagang sangat penting

untuk menciptakan sistem retribusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kerja sama ini tidak hanya soal pungutan, tetapi juga soal kepercayaan, transparansi, dan pelayanan yang saling menguntungkan

Dari hasil observasi peneliti terlihat adanya kerjasama sudah efektif yang mana petugas memastikan pedagang yang aktif pada pasar paringin serta melaporkan setiap kendala di lapangan, seperti pedagang yang menunggak atau penolakan pembayaran, dapat ditangani secara cepat dan tepat melalui pendekatan yang terpadu.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama dalam retribusi toko pasr paringin sudah efektif dimana kerja sama antara penerima retribusi dan pedagang sangat penting untuk menciptakan sistem retribusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kerja sama ini tidak hanya soal pungutan, tetapi juga soal kepercayaan, transparansi, dan pelayanan yang saling menguntungkan.

SIMPULAN

Efektivitas penerimaan retribusi sewa toko dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Paringin dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: Pertama, proses penagihan retribusi belum berjalan dengan efisien. Penarikan retribusi masih dilakukan berdasarkan lokasi atau blok toko, yang dianggap kurang efektif dibandingkan metode penghitungan berbasis kubikasi yang telah diterapkan di daerah lain. Kedua, sasaran penerimaan belum tercapai secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh persaingan dengan platform digital (marketplace) dan pertumbuhan toko-toko modern, serta banyaknya kios yang tidak lagi beroperasi. Akibatnya, realisasi retribusi tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Ketiga, pencapaian target retribusi sewa toko belum menunjukkan hasil yang memuaskan setiap tahunnya. Penurunan pendapatan pedagang dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama tidak tercapainya target yang ditetapkan. Keempat, kegiatan sosialisasi kepada para pedagang masih kurang efektif. Minimnya penyampaian informasi mengenai kebijakan retribusi, ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan pedagang, membuat kesadaran untuk membayar retribusi menjadi rendah. Kelima, dari sisi koordinasi, pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Petugas penagihan melakukan proses penerimaan pembayaran dari pedagang, memberikan bukti pembayaran resmi, lalu menyetorkan dana ke kas daerah melalui petugas atau bendahara yang telah ditunjuk. Keenam, kerja sama antara petugas retribusi dan pedagang sudah menunjukkan hubungan yang positif. Sinergi ini penting untuk menciptakan sistem retribusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ketujuh, kepatuhan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan. Beberapa pedagang tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar di bawah jumlah yang seharusnya. Kedelapan, pengadaan blangko retribusi dinilai sudah efektif. Blangko dicetak secara berkala guna menjamin ketersediaan bukti pembayaran yang sah, serta mendukung kelancaran proses pemungutan dan pencatatan PAD. Kesembilan, kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi masih terbatas. Hanya satu orang petugas yang menangani seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan penagihan dan pencatatan data wajib retribusi, yang mengakibatkan beban kerja terlalu tinggi dan kurang efektif.

Faktor Penghambat dan Pendukung. Faktor Penghambat: Sistem penagihan yang masih konvensional dan belum efisien. Persaingan dengan marketplace dan toko modern. Pendapatan pedagang yang mengalami penurunan. Rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajiban. Ketidaktepatan waktu dan jumlah pembayaran oleh pedagang. Faktor Pendukung: Pelaksanaan retribusi telah mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Petugas secara aktif melakukan verifikasi terhadap pedagang yang masih aktif berjualan di pasar.

Saran

Untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan disarankan agar dilakukan penambahan jumlah petugas yang bertugas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi. Penambahan personel ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan retribusi pasar, sehingga dapat berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, perlu diterapkan sistem sanksi administratif atau denda bagi penyewa toko yang menunggak pembayaran secara jelas dan konsisten. Dalam kasus keterlambatan yang berkepanjangan, pendekatan persuasif terlebih dahulu perlu dilakukan. Jika pendekatan tersebut tidak berhasil, maka disarankan agar hak sewa dapat dicabut dan diberikan kepada pihak lain yang lebih kooperatif.

Untuk Pengelola UPTD Pasar Paringin perlu adanya sikap yang lebih tegas dan terstruktur dalam melakukan penagihan retribusi kepada para pedagang di lingkungan Pasar Paringin. Ketegasan ini bertujuan agar proses pemungutan retribusi dapat berjalan lebih terencana dan terukur. UPTD juga disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi, misalnya dengan mengumumkan secara berkala jumlah penerimaan serta pemanfaatan dana retribusi kepada publik. Langkah ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari para pedagang serta meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran retribusi tepat waktu.

Untuk Para Pedagang di Pasar Paringin diharapkan para pedagang dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tertib dan tepat waktu. Ketaatan ini sangat penting untuk mendukung tercapainya target penerimaan daerah, sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas pasar serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Anonim, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Anonim, Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, serta lokasi pembayaran retribusi

Miles, Huberman dan Saldana, 2017. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook*. Publications.

Hasanah, N. and Putri, M. (2025) 'STRATEGY FOR IMPLEMENTING EXCELLENT SERVICE IN S LAUNDRY BUSINESSES IN THE NORTHERN HULU SUNGAI REGENCY', *Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)*, 2(1), pp. 120–130.

Steers, M Richard. 2017. *Efektivitas Organisasi Perusahaan* (Cetakan ke 4). Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.

Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.